

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adami Chazawi, Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. PT Rajagrafindo Persada

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum pidana memahami Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan*, Yogyakarta

Ekon P.M Yanto, “*Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*”

Gatot Efrianto and Danu Rahaman, *Pemalsuan Dalam Akta Otentik*, n.d.

Soerjono Soekanto & Srimudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo persada Fitri Wahyuni 2017, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama

Tofik Yanuar Chandra, 2002, “*Hukum Pidana*” PT Sanggiri multi usaha

Sumber Jurnal:

Abigail, Amara Diva. “*Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik Dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris*” 2, no. 3 (2022): 506–14.

Fakhriyah, VN (2020). Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/PID/2016). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 10 (2), 35-56.

Kaligis, G. V. (2021). Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP. *Lex Privatum*, 9(4).

Penegakan, Efektivitas, and Hukum Terhadap. “*Journal of Philosophy (JLP)*” 3 (2022): 312–27.

Rahmawati, N. A. P., & Syaifuddin Zuhdi, S. H. I. (2024). Keterangan Palsu dalam Akta Otentik (Studi Putusan Nomor 81/Pid. B/2023/Pn. Skt Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Sa’it, A. (2021). *Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik. Jurnal Education and Development*, 9(4), 773-776.

Simaremare, T., Hamdan, M., Mulyadi, M., & Leviza, J. (2015). Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik (Studi

Putusan Nomor: 1545/pid.b/2012 Pn. Medan. Jo Putusan Nomor: 39/pid/2013/pt. medan.). Jurnal Hukum USU , 3 (3), 97-110.

Undang-undang

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Putusan Pengadilan

1. Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr
2. Nomor 80 K/Pid/2019
3. Nomor 75 PK/Pid/2020